

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2021



KECAMATAN NGORO
KAB. MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngoro Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngoro Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022

CAMAT NGORO



SUGENG NURYADI, S.IP,MM
Pembina
NIP. 196810101989031008

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III A. Capaian Kinerja.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja	14
C. Realisasi Anggaran	22
BAB IV Penutup	25
A. Kesimpulan	25

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Ngoro 2016 - 2021
2. Matriks Renja Kecamatan Ngoro Tahun 2011
3. Matriks Renja Kecamatan Ngoro Tahun 2022
4. IKU Kecamatan Ngoro
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2021
9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
10. Struktur Organisasi
11. Laporan Kinerja JFU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngoro Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Ngoromempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Ngorojuga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting

pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Aspek Geografi

Kecamatan Ngoro termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 60,56 Km², tepatnya terletak sekitar 25 Km sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis Kecamatan Ngoro terletak di kisaran 112°33' Bujur Timur dan antara 7°31' Lintang Selatan dengan ketinggian 138 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Ngoro memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah timur : Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
- Sebelah selatan : Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
- Sebelah barat : Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Ngoro beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jenis tanah di wilayah Kecamatan Ngoro ada 2 jenis, yaitu alluvial (tanah yang berasal dari endapan sungai) yang terdapat pada sisi utara, dan jenis regusol (tanah yang berasal dari batu endapan berkapur di daerah bukit dan batu bekuan dan intermedier di daerah bukit dan gunung) yang terdapat di bagian selatan Kecamatan Ngoro.

Tabel 1.1
Tinggi dan Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah*) (Km2)
1	Srigading	500	2,36
2	Kesemen	500	2,44
3	Kutogirang	450	4,85
4	Lolawang	23	4,64
5	Wotanmas Jedong	450	9,56
6	Tanjangrono	10	3,90
7	Kunjorowesi	600	5,81
8	Manduro MG	350	7,06
9	Wonosari	135	2,33
10	Ngoro	138	3,35
11	Sedati	130	1,41
12	Purwojati	133	2,83
13	Jasem	30	2,14
14	Sukoanyar	30	1,24
15	Bandarasri	10	1,63
16	Kembangsri	30	1,45
17	Candiharjo	30	1,08
18	Watesnegoro	130	4,12
19	Tambakrejo	30	0,38
	Kecamatan Ngoro	138	60,56
Keterangan : *) Luas daerah tidak termasuk hutan Negara			

Sumber : Statistik Kecamatan Ngoro 2016

Secara administratif wilayah Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 desa. Luas wilayah Kecamatan Ngoro secara keseluruhan adalah 60,56 km².

b. Aspek Demografi

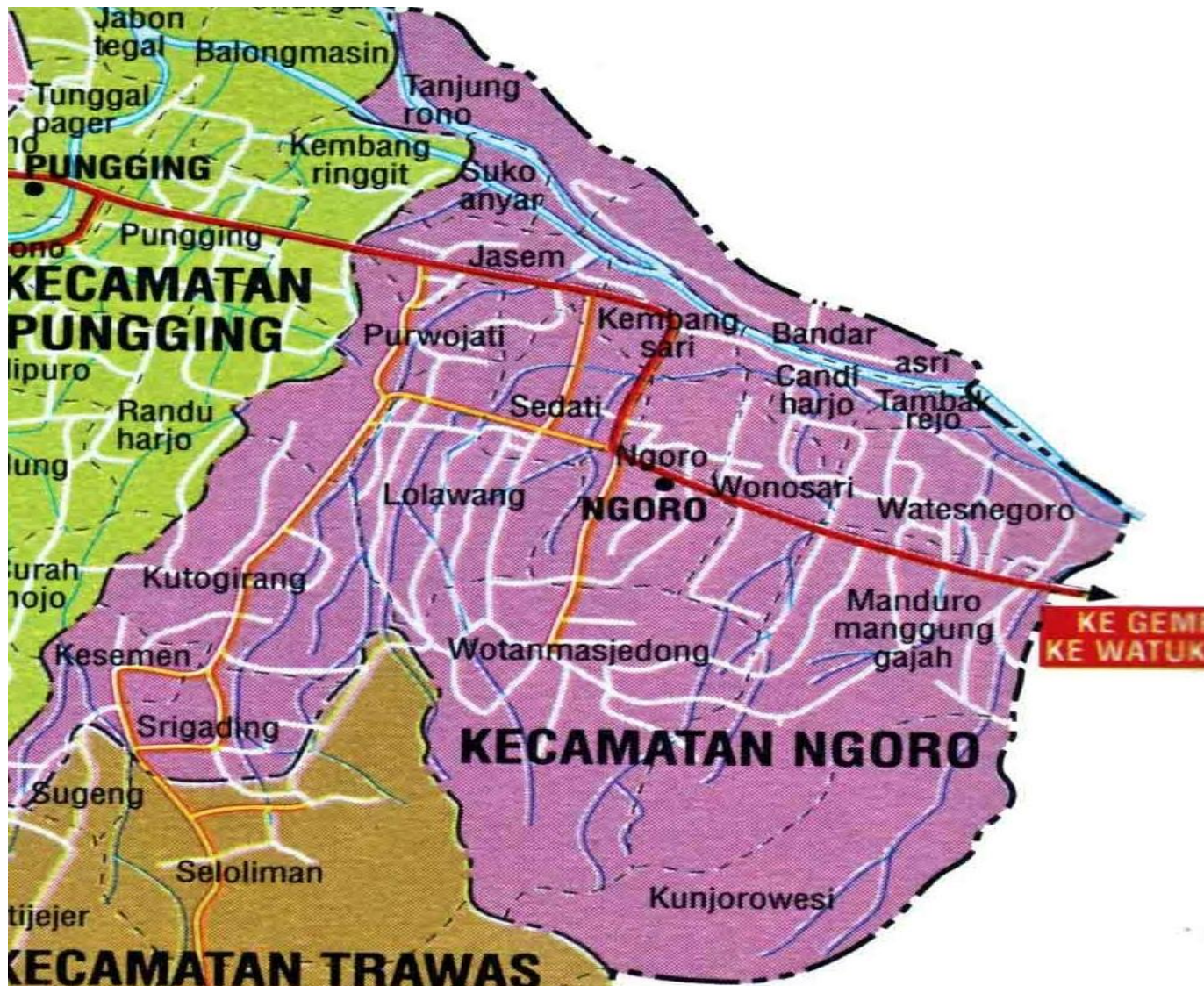
Jumlah penduduk Kecamatan Ngoro Tahun 2021 sebesar 83.017 Jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 6 tahun terakhir mencapai 1,62 %. Jumlah penduduk dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk Kecamatan Ngoro Tahun 2016 – 2021

Jumlah Penduduk	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Laki-laki	43.101	43.772	44.947	42.830	43.391	41.553
Perempuan	43.355	43.964	44.897	42.761	43.278	41.464
Total	86.456	87.736	89.844	85.591	86.669	83.017

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngoro

Peta Kecamatan Ngoro

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Ngoro mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Ngoro berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Ngoro.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah terbatas untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngoro.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2021, Kecamatan Ngoro masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 8 orang pegawai.
2. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi. Karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Ngoro dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Ngoro termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Ngoro ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
4. Masih adanya aparaturnya yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Ngoro selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngoro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Ngoro Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Ngoro pada tahun 2021 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR KECAMATAN NGORO TAHUN 2021

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	TUJUAN : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	IKM	Kec Ngoro			
I.1	Sasaran : Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan ASN	Kec. Ngoro	80%		
		2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	Kec. Ngoro	100%		
I.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	Kec Ngoro	100%	3,753,334,813	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Kec Ngoro	80%	6,000,000	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Kec Ngoro	100%	3,000,000	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	Kec Ngoro	100%	3,000,000	APBD

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Kec Ngoro	80%	3,404,334,813	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngoro	14 Bulan	3,399,334,813	APBD
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	Kec Ngoro	12 Dokumen	5,000,000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya	Kec Ngoro	30 Stel	20,000,000	APBD
	-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lengkapnya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec Ngoro	30 Stel	20,000,000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD yang terlaksana sesuai target	Kec Ngoro	90%	190,000,000	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Ngoro	1 Paket	10,000,000	APBD
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec Ngoro	10 Paket	75,000,000	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Mamin	Kec Ngoro	12 bulan	15,000,000	APBD
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Kec Ngoro	1 Paket	15,000,000	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Kec Ngoro	1 Paket	30,000,000	APBD
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan mamin tamu	Kec. Ngoro	12 Bulan	5,000,000	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ngoro	12 Bulan	40,000,000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai target	Kec Ngoro	90%	40,000,000	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Ngoro	12 bulan	40,000,000	APBD
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	Kec Ngoro	2 THL	26,808,960	APBD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	Kec Ngoro	94.00%	93,000,000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	Kec Ngoro	4 Kendaraan	38,000,000	APBD
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec Ngoro	3 Gedung	40,000,000	APBD
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kec Ngoro	1 Paket	15,000,000	APBD
I.2	Sasaran : Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	1. Persentase pelayanan umum dan perijinan Kecamatan yang sesuai SP	Kec. Ngoro	85%		
		2. Persentase Fasilitasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sesuai bidang.	Kec. Ngoro	90%		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec Ngoro	81%	35,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah dokumen PATEN yang terlayani tepat waktu	Kec Ngoro	400 Dokumen	35,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec Ngoro	15 Pelayanan	10,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec Ngoro	385 pelayanan	25,000,000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Bidang Kemasyarakatan	Kec. Ngoro	81%	100,000,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Jenis koordiansi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Ngoro	2 Jenis	100,000,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Ngoro	32 Kegiatan	60,000,000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Ngoro	4 Pembinaan	40,000,000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Ngoro	90%	71,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngoro	2 Jenis	71,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Ngoro	12 Kegiatan	36,000,000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Ngoro	5 Kegiatan	35,000,000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan dan Pembangunan	Kec. Ngoro	81%	87,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Ngoro	19 Desa	87,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ngoro	7 Fasilitasi	14,000,000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ngoro	19 desa	29,000,000	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ngoro	19 Desa	8,000,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ngoro	19 desa	12,000,000	

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ngoro	19 Desa	24,000,000	
--	--	---	------------	---------	------------	--

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 KECAMATAN NGORO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%
		Persentase	81%

		rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.961.741.788	APBD-P
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22.680.000	APBD-P
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.000.000	APBD-P
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 71.000.000	APBD-P
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 87.000.000	APBD-P
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021		Rp. 4.242.421.788	

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERBAIKAN TAHUN 2021
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja OutPut	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.779.143.773	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.000.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 71.000.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 87.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 4.072.143.773	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	98,71%	100%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	94,65%	100%

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan pada Kecamatan Ngoro dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 99 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Ngoro dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 90 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Ngoro pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78 Baik	84,5 Baik	-	-	86,64
	Cakupan pelayanan umum	78%	100%	-	-	

	dan perijinan					
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	(6,36 %)	-	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%	-	85,53 %	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	79%	-	98,42 %		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	-	-	98,71 %	95%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan,	81%	-	-	94,65 %	95%

	Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial					
--	---	--	--	--	--	--

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode
RPJMD/RENSTRA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Sangat Baik	78 Baik	97,5%
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	80%	78%	97,5%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	4% Dari tahun ke nol renstra (tahun 2016)	(6,36%)	0%
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	81%	85,53%	100%
	Persentase rekomendasi hasil	81%	98,42%	100%

	koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	98,71%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	94,65%	100%

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	98,71%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	95,34%	-	-

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar	35.000.000	0,83%

		Pelayanan		
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	258.000.000	6,08%

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	83%	98,71%	100%	22.680.000	22,671,547.00	99,96%
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		800 Pelayanan	863 Pelayanan	100%	22.680.000	22.671.547,00	99,96%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	44 Kegiatan	44 Kegiatan	100%	258.000.000	254,432,582.00	98,62%
1. Program Pemberdayaan		24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	100.000.000	96,746,724.00	97,09%

Masyarakat							
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	71.000.000	70,874,258.00	99,82%
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%	87.000.000	86,811,600.00	99,63%

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	98,71%	1,29%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	100%	94,64%	5,36%

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

Persentase Penduduk Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2021

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2020	43.466	42.016	85.482	103,45
2021	44.398	43.369	87.767	102,37

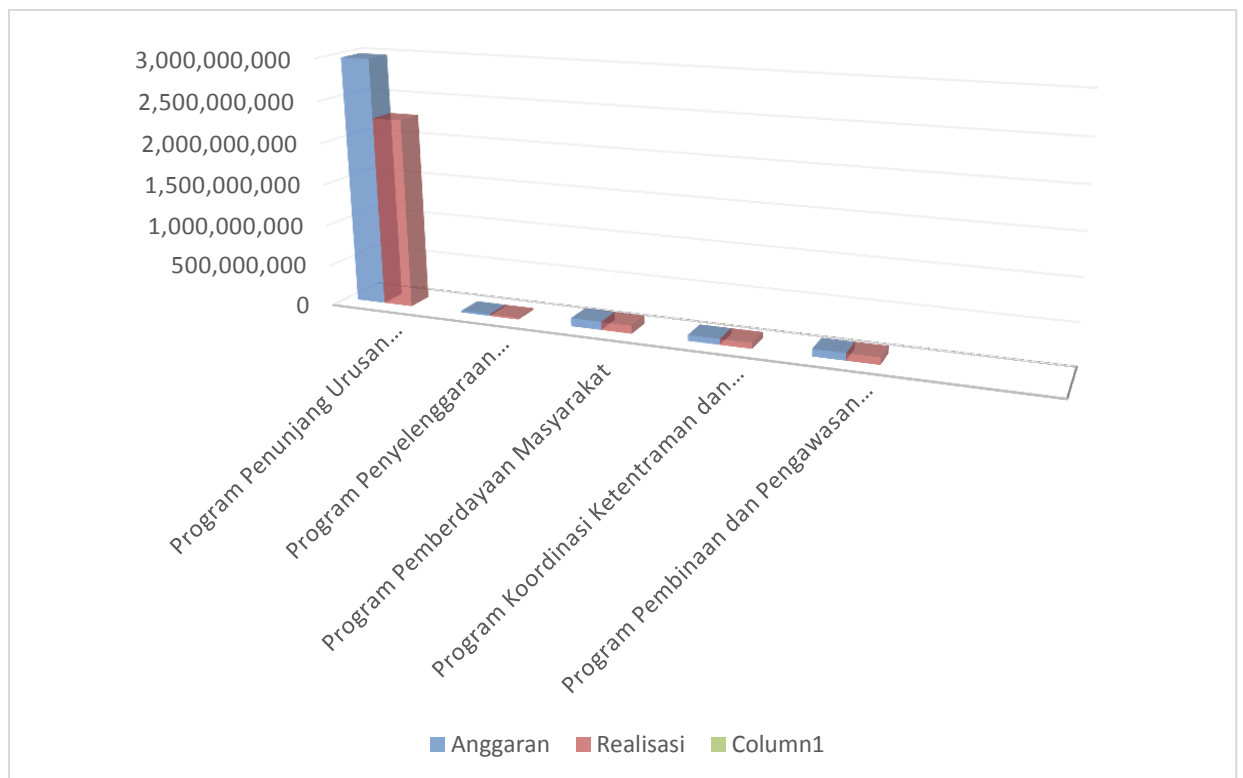
Sumber : data lap kependudukan Kec. Ngoro

5. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.9

Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2021

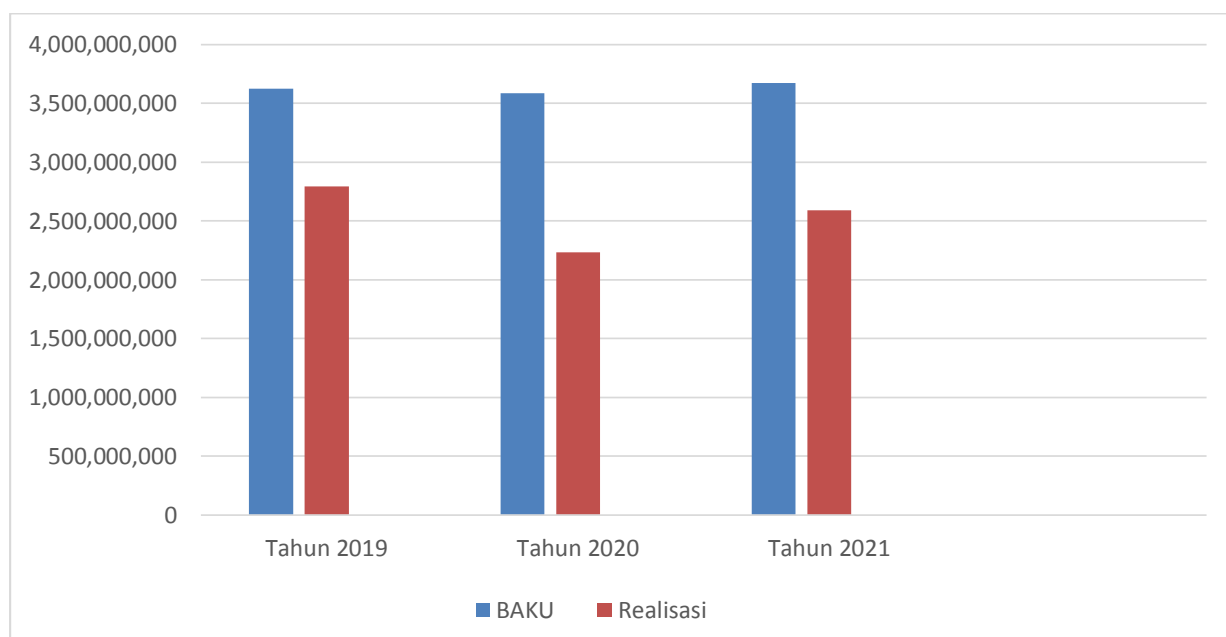
NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3,961,741,788.00	Rp. 3,164,792,263.00	95,47%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22.680.000	Rp. 22.671.547	99,97%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.000.000	Rp. 96.746.724	97,09%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 71.000.000	Rp. 70.874.258	99,82%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 87.000.000	Rp. 86.811.600	99,63%



Tabel 3.10

Persentase Realisasi PBB Kecamatan Ngoro Tahun 2019 s/d Tahun 2021

NO	TAHUN	BAKU	REALISASI	%
1	2019	3.624.680.908	2.794.244.395	76,54
2	2020	3.586.750.118	2.234.264.726	62,29
3	2021	3.681.105.060	2.587.970.222	70,29



C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Ngoro Tahun 2021 sebesar Rp. 4.242.421.788,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.441.896.392 atau 81.13% dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	TA. 2021		% Capaian
					Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.999.650	99,98
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.999.700	82,67
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.282.414.813	2.512.108.032	76,53

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	4.999.750	99,99
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Fasilitas kunjungan tamu - Penyediaan Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000 225.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 30.000.000 14.268.905	9.999.400 219.149.956 15.000.000 14.999.808 4.985.500 29.998.076 13.480.000	99,99 97,40 100 99,99 99,71 99,99 94,47
	4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.000.000	133.515.560	92,08

		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	38.000.000	36.484.900	96,01
				-			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.000.000	48.963.200	99,92
				- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.928.662	99,52
		6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	19.835.970	99,18
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	32.615.139	81,54

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.808.960	26.808.960	100
2	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000	9.999.618	99,99
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Nonperizinan	12.680.000	12.671.929	99,94
3	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60.000.000	57.227.000	95,38
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	39.519.724	98,80
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.000.000	35.992.458	99,98

				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.000.000	34.881.800	99,66
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14.000.000	13.987.000	99,91
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.000.000	28.977.100	99,92
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	7.880.000	98,50
				- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000	11.993.000	99,94
				- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.000.000	23.974.500	99,89

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa semua indikator sudah hampir mencapai target.

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun mendatang optimalisasi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Ngoro Tahun 2021 sebesar Rp. 4.242.421.788,00 dapat terserap sebesar Rp. 3.441.896.392,00 atau 81.13 %.

B. SARAN

Untuk meningkatkan Kinerja Kecamatan Ngoro pada tahun mendatang, maka disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mengupayakan kesesuaian atau kecukupan anggaran dengan kebutuhan untuk kegiatan serta pegawai di Kecamatan Ngoro.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto serta instansi terkait lainnya.


CAMAT NGORO
SUGENG NURIYADI, S.IP, MM
Pembina
NIP. 196810101989031008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN	80%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap PATEN	80%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	80%
		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan, bidang ketentraman dan ketertiban umum, Bidang Pemerintahan dan Bidang	95%

		Pembangunan	
--	--	-------------	--

MATRIK RENSTRA KECAMATAN NGORO TAHUN 2016-2021



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
--------	------------------	---------------------------	-----------------	------------------

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.779.143.773,00	APBD 2021
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 35.000.000,00	APBD 2021
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 100.000.000,00	APBD 2021
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 71.000.000,00	APBD 2021
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 87.000.000,00	APBD 2021
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021		Rp 4.072.143.773,00	

			2016	2021
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey kepuasan masyarakat	Cukup Baik	Sangat Baik

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN NGORO KAB MOJOERTO

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan

Misi : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator tujuan : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
1	2	3	4	5

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN	Alasan pemilihan indikator : Sesuai dengan tugas pokok ASN kecamatan dalam melakukan pelayanan dan administrasi pemerintahan kepada masyarakat : FormulasiPerhitungan : Nilai persepsi ASN atas layanan yang diterimanya X Unsur yang diisi X Penimbang		
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Alasan pemilihan indikator : Sesuai dengan tugas pokok ASN kecamatan dalam melakukan pelayanan dan administrasi pemerintahan kepada masyarakat : FormulasiPerhitungan : Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas ASN yang baik dan benar -----x 100% Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas ASN yang baik dan benar		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	Alasan pemilihan indikator : Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehBupati terkait PATEN untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan FormulasiPerhitungan : Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar -----x 100% Jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan	Laporan Rekapitulasi data	Camat / Sekcam
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial	Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan untuk memfasilitasi tugas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan,perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial Kabupaten Formulasi Perhitungan: Jumlah hasil koordinasi yang mampu ditindaklanjuti dengan baik -----x 100% Keseluruhan hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social yang	Laporan hasil koordinasi	Camat / Sekcam

		harus ditindaklanjuti		
--	--	-----------------------	--	--

